BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Setting Penelitian

1. Deskripsi HMI Cabang Surabaya

a. Profil HMI Cabang Surabaya

HMI Cabang Surabaya adalah kelompok yang merupakan bagian dari jaringan HMI seluruh Indonesia. Di Surabaya, posisi HMI Cabang Surabaya adalah bagian kelompok yang terjaring di antara kelompok HMI kampus lainnya seperti di Unesa, ITS, dan beberapa kampus lainnya. Geliat HMI di Surabaya cukup berpengaruh di lingkungan Surabaya meskipun jumlah anggotanya bukan termasuk yang paling besar.[46]

Menurut pemaparan ketua bidang aktivis HMI yang sekaligus mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, masuknya HMI ke Surabaya tidak bisa dipastikan waktunya. Namun HMI sudah dikenal dan memiliki komunitas sekitar tahun 1963. Pembawa atau misioner yang di jadikan koordinator pun tidak diketahui secara pasti. Menurutnya, HMI muncul di Surabaya karena inisiatif individu-individu (mahasiswa dari Surabaya) yang pada akhirnya melakukan diskusi dan kajian. Baru setelah itu mereka tergabung dan mendirikan

[46] Wawancara dengan kholis (Ketua Umum HMI Cab. Surabaya 08-09), hari Jumat, 19 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HMI di Surabaya dan mempunyai beberapa Komisariat di kampus-kampus Surabaya, terutama Unair, ITS dan IAIN Sunan Ampel.[47]

Komunikasi antar kader[48] HMI cukup intens. Inilah yang menjadi salah satu faktor pendukung komunikasi mereka sehingga banyak ide-ide dan gagasan yang menjadi sebuah isu untuk dijadikan isu bersama dalam pergerakan mereka. Namun perlu dipahami bahwa HMI di Surabaya adalah bagian dari komunitas gerakan mahasiswa layaknya PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dan lainnya.

Pada awalnya HMI resmi dibentuk pada tanggal 05 Februari 1946 bertepatan dengan hari Rabu tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H, di salah satu ruangan kuliah STI di Jalan Setiodiningratan (sekarang Panembahan Senopati), salah satu mahasiswa yang menjadi pendiri HMI adalah Lafran Pane yang dalam prakatanya dalam memimpin rapat di STI antara lain mengatakan :

"Hari ini adalah pembentukan organisasi Mahasiswa Islam, karena persiapan yang diperlukan sudah beres. Yang mau menerima HMI sajalah yang diajak untuk mendirikan HMI, dan yang menentang biarlah terus menentang, toh tanpa mereka organisasi ini bisa berdiri dan berjalan"

Pada awal pembentukkannya HMI bertujuan diantaranya antara lain:

1. Mempertahankan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia.

---

[47] Wawancara dengan Basriadi (mantan Ketua Bidang PTKP HMI Cab. Surabaya 07-08), hari Jumat, 19 Juni 2009

[48] Kader adalah mahasiswa yang sudah masuk dalam HMI (anggota)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Sementara tokoh-tokoh pemula / pendiri HMI antara lain : Lafran Pane (Yogya), Karnoto Zarkasyi (Ambarawa), Dahlan Husein (Palembang), Maisaroh Hilal (Singapura), Suwali, Yusdi Ghozali (Semarang), Mansyur, Siti Zainah (Palembang), M. Anwar (Malang), Hasan Basri, Marwan, Zulkarnaen, Tayeb Razak, Toha Mashudi (Malang), Baidron Hadi (Yogyakarta).

b. Aktifitas HMI Cabang Surabaya

Aktifitas gerakan HMI Menurut Kholis tidak jauh dari agenda-agenda yang diusung oleh PMII atau HTI yang secara keseluruhan merupakan kegiatan yang bersifat politik. Namun demikian, untuk mencapai target politik berbeda dengan kegiatan organisasi ekstra kampus lainnya, HMI Cabang Surabaya mengarahkan agenda politiknya lebih ke wilayah publik atau langsung ke perubahan regulasi di daerah Surabaya atau Jawa Timur. Sementara pada wilayah kampus di Surabaya sendiri, mereka memfokuskan pada wilayah pembasisan masa.[49]

Selain agenda-agenda di atas, para aktivis HMI Cabang Surabaya pun kerap melakukan pembacaan sosial tentang isu-isu politik kontemporer dan pelaksanaan advokasi-advokasi sebagai satu alternatif untuk memecahkan persoalan di Indonesia. Beberapa fakta

[49] Wawancara dengan kholis, hari Sabtu 20 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kegiatan tersebut adalah penyebaran buletin muara insan cita, selebaran, penempelan pamflet dan brosur.

Dengan penerapan sistem ideologi mereka dan penyikapan terhadap isu-isu sosial yang dikolaborasikan dengan NDP (Nilai Dasar Perjuangan)[50], HMI Cabang Surabaya sebagai agen perubahan kerap melakukan diskusi dan kajian, bedah buku, pelatihan, pengkadern dan seminar. Adapun beberapa kegiatan tersebut dapat dilihat pada lampiran.

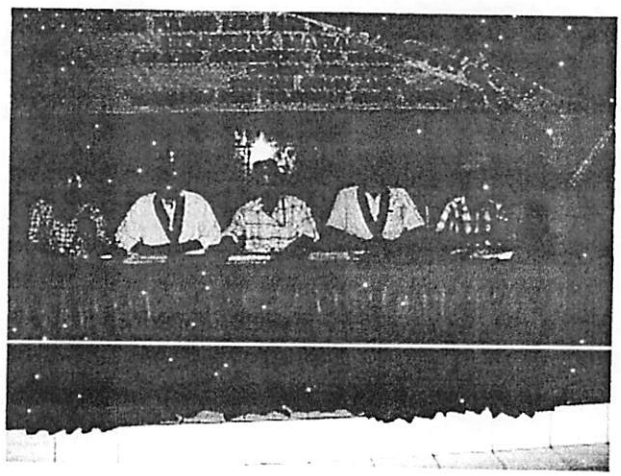

Gambar 1: Seminar Maperca HMI Cabang Surabaya

c. Agenda lima kualitas insan cita

Kualitas insan cita HMI adalah merupakan dunia cita yang terwujud oleh HMI di dalam pribadi seorang manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan tugas kerja

[50] NDP Sebagai kerangka global pemahaman islam dalam konteks organisasi HMI yang tidak hanya berbicara mengenai sekumpulan kebijakan praktis. Karena itu dapat dilihat bahwa NDP baru tidak membicarakan seperangkat kebijakan praktis seperti; halal dan haram, sunnah atau wajib. Tetapi berbicara tentang realitas/wujud objektif dari segi sebagaimana adanya. Karena itu NDP merupakan sebuah pandangan dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanusiaan. Kualitas tersebut sebagaimana dalam pasal tujuan (pasal 5 AD HMI) adalah sebagai berikut :[51]

1. Kualitas Insan Akademis
   - Berpendidikan Tinggi, berpengetahuan luas, berfikir rasional, obyektif, dan kritis.
   - Memiliki kemampuan teoritis, mampu memformulasikan apa yang diketahui dan dirahasiakan. Dia selalu berlaku dan menghadapi suasana sekelilingnya dengan kesadaran.
   - Sanggup berdiri sendiri dengan lapangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ilmu pilihannya, baik secara teoritis maupun tekhnis dan sanggup bekerja secara ilmiah yaitu secara bertahap, teratur, mengarah pada tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan.
2. Kualitas Insan Pencipta : Insan Akademis, Pencipta
   - Sanggup melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih dari sekedar yang ada dan bergairah besar untuk menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih baik dan bersikap dengan bertolak dari apa yang ada (yaitu Allah). Berjiwa penuh dengan gagasan-gagasan kemajuan, selalu mencari perbaikan dan pembaharuan.

[51] PB HMI, *Hasil-Hasil Kongres XXV Himpunan Mahasiswa Islam*, (Jakarta, PT. Erdino Mutiara Agung, 2006), h. 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bersifat independen dan terbuka, tidak isolatif, insan yang menyadari dengan sikap demikian potensi, kreatifnya dapat berkembang dan menentukan bentuk yang indah-indah.
- Dengan ditopang kemampuan akademisnya dia mampu melaksanakan kerja kemanusiaan yang disemangati ajaran islam.

3. Kualitas Insan Pengabdi : Insan Akdemis, Pencipta, Pengabdi
   - Ikhlas dan sanggup berkarya demi kepentingan orang banyak atau untuk sesama umat.
   - Sadar membawa tugas insan pengabdi, bukannya hanya membuat dirinya baik tetapi juga membuat kondisi sekelilingnya menjadi baik.
   - Insan akdemis, pencipta dan mengabdi adalah yang bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dan ikhlas mengamalkan ilmunya untuk kepentingan sesamanya.
4. Kualitas Insan yang bernafaskan islam : Insan Akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam
   - Islam yang telah menjiwai dan memberi pedoman pola fikir dan pola lakunya tanpa memakai merk Islam. Islam akan menajdi pedoman dalam berkarya dan mencipta sejalan dengan nilai-nilai universal Islam. Dengan demikian Islam telah menafasi dan menjiwai karyanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Ajaran Islam telah berhasil membentuk "unity personality" dalam dirinya. Nafas Islam telah membentuk pribadinya yang utuh tercegah dari split personality tidak pernah ada dilema pada dirinya sebagai warga negara dan dirinya sebagai muslim. Kualitas insan ini telah mengintegrasikan masalah suksesnya pembangunan nasional bangsa ke dalam suksesnya perjuangan umat islam Indonesia dan sebaliknya.

5. Kualitas Insan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT :
   - Insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.
   - Berwatak, sanggup memikul akibat-akibat yang dari perbuatannya sadar bahwa menempuh jalan yang benar diperlukan adanya keberanian moral.
   - Spontan dalam menghadapi tugas, responsif dalam menghadapi persoalan-persoalan dan jauh dari sikap apatis.
   - Rasa tanggung jawab, taqwa kepada Allah SWT, yang menggugah untuk mengambil peran aktif dalam suatu bidang dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.
   - Korektif terhadap setiap langkah yang berlawanan dengan usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Percaya pada diri sendiri dan sadar akan kedudukannya sebagai "khallifah fil ard" yang harus melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan

Pada pokoknya insan cita HMI merupakan "man of future" insan pelopor yaitu insan yang berfikiran luas dan berpandangan jauh, bersikap terbuka, terampil atau ahli dalam bidangnya, dia sadar apa yang menjadi cita-citanya dan tahu bagaimana mencari ilmu perjuangan untuk secara kooperatif bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan. Ideal tipe dari hasil perkaderan HMI adalah "man of inovator" (duta-duta pembantu). Penyuara "idea of progress" insan yang berkeperibadian imbang dan padu, kritis, dinamis, adil dan jujur tidak takabur dan bertaqwa kepada Allah Allah SWT. Mereka itu manusia-manusia uang beriman berilmu dan mampu beramal saleh dalam kualitas yang maksimal (insan kamil)

Dari lima kualitas insan cita tersebut pada dasarnya harus memahami dalam tiga kualitas insan Cita yaitu kualitas insan akademis, kualitas insan pencipta dan kualitas insan pengabdi. Ketiga insan kualitas pengabdi tersebut merupakan insan Islam yang terefleksi dalam sikap senantiasa bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang ridhoi Allah SWT.

d. Respon Terhadap Gerakan HMI Cabang Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada beberapa mahasiswa Surabaya (IAIN Sunan Ampel, UNAIR, ITS, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UNESA) sebagian besar mahasiswa kurang berminat untuk bergabung dengan gerakan HMI. Namun demikian, hampir sebagian besar menanggapi positif terhadap kegiatan-kegiatan keislaman yang mereka lakukan seperti kajian Islam di masjid dan seminar.

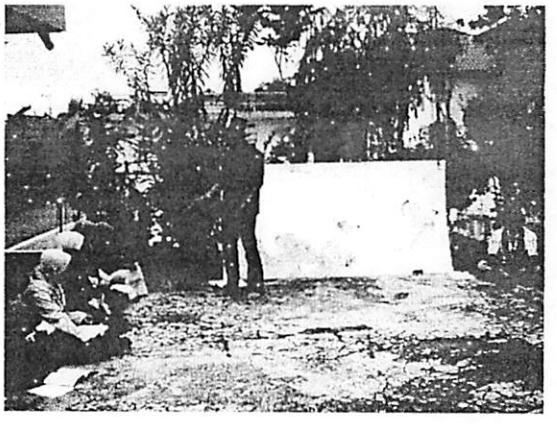

Gambar 2: Kajian Sosial HMI Cabang Surabaya

Menurut Ghoib, mahasiswa semester VII jurusan sejarah Islam Fakultas Adab, kegiatan yang dilakukan oleh para aktivis HMI sangat positif. "saya pernah mengikuti kajian mereka di masjid Ulul Albab IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang kemerosotan moral remaja saat ini. Yah.. sangat baguslah.." tuturnya.[52]

Berbeda dengan Ali Mansur, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional UNAIR yang menganggap ada beberapa hal yang tidak cocok dengan ajaran HMI. Namun dia tidak mau menyebutkan lebih lanjut tentang ajaran yang dianggap menyimpang tersebut.[53] Beberapa mahasiswa lainya justru tidak tahu tentang HMI .

[52] Wawancara dengan Ghoib, Senin, 22 Juni 2009
[53] Wawancara dengan Ali Mansur, Senin 22 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan Dian mahasiswi dari UNESA, baru tahu HMI ketika ditanya tentang HMI.[54] Begitu juga dengan Silvi, yang mengaku tidak tahu tentang HMI tapi pernah mendengar kata-kata HMI disebuah seminar yang terlupakan waktunya.[55] Akan tetapi ada beberapa mahasiswa yang sangat simpatik dengan HMI di Surabaya seperti pengakuan Rofik yang pernah mengikuti latihan kader HMI Komisariat FISIP Unair.[56]

Hal serupa juga diucapkan oleh Raidong Habibi, menteri luar negeri BEM IAIN Sunan Ampel Surabaya yang mengatakan bahwa HMI adalah gerakan yang sah untuk tumbuh dan berkembang di Surabaya. Secara pribadi dia sepakat dengan semangat yang diusung yaitu keislaman universal dan kebangsaan di Indonesia. Menurutnya, NKRI sudah final dan sistem Negara sangat membutuhkan spirit-spirit seperti yang diusung oleh HMI.[57]

Demikianlah beberapa pandangan mahasiswa yang dapat diambil benang merah bahwa mahasiswa Surabaya diminati dengan gerakan HMI. Hal ini pun diperkuat dengan jumlah kader HMI Cabang Surabaya yang mencapai sekitar 300 mahasiswa. Jumlah itu pun menurut Lufiyah Alindah, seorang aktivis LSPK (Lembaga Studi Perempuan dan Keadilan) mangalami pengurangan karena konsen HMI sekarang sudah berbeda seperti dahulu.

---

[54] Wawancara dengan Dian, Selasa 23 Juni 2009
[55] Wawancara dengan Silvi, Senin 22 Juni 2009
[56] Wawancara dengan Rofik, Senin 22 Juni 2009
[57] Wawancara dengan Reidong Habibi Rambe, Selasa 23 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Visi dan Misi HMI Cabang Surabaya

Tujuan yang jelas diperlukan untuk suatu organisasi, hingga setiap usaha yang dilakukan oleh organisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan teratur. Bahwa tujuan suatu organisasi dipengaruhi oleh suatu motivasi dasar pembentukan, status dan fungsinya dalam totalitas dimana ia berada. Dalam totalitas kehidupan bangsa Indonesia, maka HMI adalah organisasi yang menjadikan Islam sebagai sumber nilai. Motivasi dan inspirasi bahwa HMI berstatus sebagai organisasi mahasiswa, berfungsi sebagai organisasi kader dan yang berperan sebagai organisasi perjuangan serta bersifat independen.[58]

Pemantapan fungsi kekaderan HMI ditambah dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia sangat kekurangan tenaga intelektual yang memiliki keseimbangan hidup yang terpadu antara pemenuhan tugas duniawi dan ukhrowi, iman dan ilmu, individu dan masyarakat, sehingga peranan kaum intelektual yang semakin besar dimasa mendatang merupakan kebutuhan yang paling mendasar.

Atas faktor tersebut, maka HMI menetapkan tujuannya sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4. AD ART HMI yaitu :[59]

"Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan islam dan bertanggung *jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi allah swt".*

---

[58] Op. Cit., *Hasil-Hasil Kongres XXV Himpunan Mahasiswa Islam*, h. 61-62
[59] Ibid., h.61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan rumusan tersebut, maka pada hakekatnya HMI bukanlah organisasi massa dalam pengertian fisik dan kualitatif, sebaliknya HMI secara kualitatif merupakan lembaga pengabdian dan pengembangan ide, bakat dan potensi yang mendidik, memimpin dan membimbing anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan dengan cara-cara perjuangan yang benar dan efektif.

Berlandaskan konsep di ataslah para aktivis HMI Cabang Surabaya gencar melakukan propaganda-propaganda melalui selebaran, pamflet dan pembagian buletin Insan Cita kepada masyarakat dan khususnya warga kampus baik mahasiswa maupun dosen dan pegawai.[60]

Fenomena maraknya selebaran dan pamflet yang ditempel di gang-gang dan pintu-pintu kampus merupakan pemandangan yang akrab di HMI Cabang Surabaya khususnya di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sampai saat ini para aktivis HMI Cabang Surabaya selalu gencar melakukan misi dakwahnya pada mahasiswa Surabaya terutama mahasiswa baru (Maba) untuk penambahan basis kader. Namun agenda yang mereka lakukan masih sebatas propaganda-propaganda dan belum begitu kuat pada praktek politik kampus Surabaya.

2. Setting Budaya Masyarakat Surabaya

Secara umum, pembangunan suatu bangsa ataupun masyarakat melalui kebudayaan yang ditumbuh-kembangkannya, ditandai oleh

[60] Wawancara dengan Basriadi, Jumat 19 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai sistem pewarisan yang terjadi dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sistem pewarisan tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan arah bagi kebijakan-kebijakan pembangunan, baik di bidang sosial, budaya, politik maupun ekonomi, bahkan pertahanan dan keamanan. Sehingga, masyarakat benar-benar menjadi bagian integral dengan pembangunan yang dijalankan secara bersama-sama dalam suatu komunitas sosial yang telah disepakati sebelumnya. Pembangunan yang dijalankan bersama-sama dan adanya kesepakatan bersama merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh seluruh warga masyarakat.

Sebagai kota besar, pencitraan kota Surabaya lebih didominasi oleh kalau meminjam istilah Marx, Klas penguasa para pemilik alat-alat produksi (termasuk birokrasi) memanfaatkan kekuasaan ekonomis (dan politik) mereka untuk membentuk budaya masyarakat. Dalam satu artikelnya yang terkenal *The German Ideologi* (edisi pertama 1846), Marx dan Engels berpendapat, bahwa "Dalam setiap zaman, gagasan tentang klas-penguasa adalah gagasan-gagasan yang menguasai (*the ruling ideas*): klas di mana kekuatan material yang dominan dalam masyarakat sekaligus juga merupakan kekuatan intelektual yang dominan. Klas yang memiliki alat-alat yang melayani produksi material, pada saat yang sama, juga mengontrol alat-alat produksi mental, dengan akibat bahwa gagasan orang-orang yang tidak memiliki alat-alat produksi mental, pada umumnya, bergantung kepadanya. Gagasan-gagasan dominan tidak lebih dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekspresi ideal dari hubungan-hubungan material dominan yang dimaknai sebagai ide-ide". Para pemikir Marxian kontemporer memanfaatkan pernyataan-pernyataan itu sebagai dasar untuk mengembangkan teori-teori Marxis mengenai institusi-institusi (pranata-pranata) seperti media massa.

Budaya yang tumbuh dari kelas penguasa ini membumihanguskan kemungkinan menguatnya budaya lokal yang konstruktif dan dinamis. Ibarat Orde Baru menanamkan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam segala tatanan kehidupan masyarakat, yang juga membumihanguskan budaya-budaya lokal dengan menyeragamkan segala basis ideologis masyarakat hingga ke sikap mentalnya. Kiranya, kita belum melakukan perubahan apa-apa bahkan mungkin mundur ke belakang, dalam konstruksi kebudayaan kita sendiri.

Parsons melihat budaya berubah secara lambat. Ia menyadari bahwa budaya yang sama tidak harus diterima setiap orang sebagai milik bersama, namun ia berkeyakinan bahwa bagian terbesar masyarakat harus menerima aspek-aspek terbanyak dari budaya tertentu, jika masyarakat itu ingin berfungsi secara mulus dan bertahan hidup. Seperti Durkheim, Parsons yakin bahwa perubahan-perubahan yang penting dalam suatu budaya juga terjadi seiring berubahnya suatu masyarakat secara bertahap. Secara khusus, Parsons berpendapat, bahwa ketika masyarakat berubah dari keadaan sederhana menjadi lebih rumit, terjadi juga perubahan nilai-nilai yang mendasari sistem sosialnya. Namun demikian, perubahan nilai-nilai tidak akan pernah terjadi bila kekuatan pendorong perubahan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menjadi bagian dari kekuatan pemberangus unsur-unsur kebudayaan yang ada.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Gerakan 1998 Perspektif HMI Cabang Surabaya

Di akhir tahun 1997 Indonesia mengalami resesi ekonomi sebagai akibat dari kewajiban untuk membayar hutang luar negeri yang sudah mengalami jatuh tempo. Dampak dari krisis ekonomi di Indonesia yang berkepanjangan ini adalah naiknya harga-harga sembako. Bulan-bulan berikutnya di tahun 1998 adalah malapetaka bagi rezim Orba. Tidak seperti yang banyak dibayangkan oleh pakar-pakar politik, perlawanan massa berkembang sedemikian cepat dan masif di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia. Posko-posko perlawanan sebagai simbol perlawanan terhadap rezim muncul diberbagai kampus dan dalam kesehariannya posko ini sangat disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang politis sifatnya seperti rapat-rapat koordinasi, pemutaran film-filim politik, dan lain-lain. Tak nampak lagi kultur mahasiswa yang sebelumnya apatis, hedon, cuek, dan lain-lain (penelitian 1978 oleh Sarlito mahasiswa yang tergolong aktivis 7,2 %, sedangkan 91,8 % non-aktivis).[61] Hampir di setiap sudut kita dapat menemukan mahasiswa yang berbicara tentang politik, benar-benar sesuatu yang baru.

Puncak dari tindakan represi ini adalah dengan ditembaknya 4 mahasiswa Univ. Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Penembakan ini

---

[61] Khalid Syaifullah, *Rekam Jejak Gerakan Mahasiswa Islam Pasca Reformasi*, (http//:tatanhatta.multiply.com), diakses pada Kamis 25 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memicu kemarahan massa rakyat, yang representasinya dilakukan dalam bentuk pengrusakan, penjarahan di beberapa tempat di Indonesia. Praktis dalam 2 hari pasca penembakan, Jakarta berada dalam kondisi yanag tidak terkontrol. Mahasiswa kemudian secara serempak menduduki simbol-simbol pemerintahan lembaga legislatif beberapa hari kemudian (18 Mei), yang dilakukan hingga Soeharto mundur.

Bentuk-bentuk perlawanan Organisasi mahasiswa pada saat itu adalah membentuk komite-komite aksi ditingkatan kampus yang bergerak bersama elemen eksternal serta massa rakyat untuk menuntaskan Rejim Orba.

Tanggal 21 Mei 1998 Gerakan Mahasiswa yang di dukung oleh rakyat mampu melengserkan Soeharto dan menghasilkan amanat reformasi antara lain :[62]

1. Amandemen UUD 1945
2. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI
3. Pemberantasan KKN dan adili antek-antek orde baru
4. Pembudayaan Demokrasi
5. Penegakan Hukum dan Supremasi Hukum
6. Otonomi Daerah

[62] Priyono, AE. "*Islam Negara VS Islam Sipil: Wacana Islam-Politik Warisan Orde Baru*", dalam Stanley (Edt.) Warisan Orde Baru, (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2005), h.61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Segera Setelah Peristiwa Mei 1998, Soeharto menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada wakil presiden B.J. Habibie. Selang beberapa waktu setelah penyerahan mandat tersebut, presiden baru B.J. Habibie harus bergulat dengan beragam konflik separatis di berbagai daerah seperti Timor Timur, menstabilkan iklim politik, dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan untuk mengembalikan kekuatan ekonomi mereka.

Namun, usaha Habibie untuk mengembalikan stabilitas politik Indonesia menemui jalan tidak mulus. Kebijakannya semisal membiarkan propinsi termuda Indonesia, Timor Timur untuk melepaskan diri dari NKRI dinilai oleh sebagian pemain lama politik justru mendorong lepasnya wilayah lain. Berikut kemampuan Habibie sebagai seorang teknokrat diragukan banyak kalangan untuk memimpin Indonesia.

Keinginan elit militer dan politik untuk kembali ke puncak kekuasaan memaksa Habibie untuk melangsungkan pemilihan umum dengan membuka akses berdirinya partai baru di luar 3 partai rekayasa Orde baru, Golkar, PDI, dan PPP, akhirnya membuka babak baru demokrasi Indonesia yang terlanjur diwarnai munculnya gerakan di daerah memisahkan diri dari NKRI.

Sementara itu, krisis ekonomi telah meluluhlantakan tatanan ekonomi Indonesia. Pemerintah pasca reformasi sudah kehabisan akal untuk mengeluarkan bangsa Indonesia dari krisis sosial ekonomi tak berkesudahan. Di tengah-tengah keterpurukan Indonesia, muncul lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

donor internasional sebagai 'malaikat' penyelamat dengan skema bantuan berupa pinjaman.

Sayangnya lembaga donor internasional yang diwakili oleh IMF dengan program restrukturisasi dan World Bank dengan program desentralisasinya, ternyata tidak hanya menolong Indonesia keluar dari krisis, akan tetapi semakin menjerumuskan Indonesia ke dalam jerat hutang internasional.

Krisis ekonomi Asia di tahun 1997 membawa dampak jatuhnya penguasa militer di Indonesia. Situasi memaksa Indonesia untuk berpaling pada lembaga donor internasional untuk mendapatkan pinjaman, dan bantuan pun datang dalam bentuk program restrukturisasi berupa Structural Adjustment Programs (SAPs). Dalam pengawasan ketat dari lembaga donor, Indonesia kemudian meluncurkan program desentralisasi yang ekspansif.

Pasca reformasi memunculkan rancangan perundangan baru mengenai desentralisasi pemerintahan dengan maksud memperbaiki sistem pemerintah otoriter masa lalu. Tidaklah mengherankan, undang-undang mengenai desentralisasi kemudian dirancang tanpa melihat kondisi nyata di daerah yang beragam. Perpindahan kekuasaan seketika dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kemudian dirayakan dengan munculnya euphoria rakyat di daerah.

Terbutakan oleh kekuasaan yang baru diperoleh dan terlalu banyaknya beban tanggung jawab dalam waktu singkat, pemerintah daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

donor internasional sebagai 'malaikat' penyelamat dengan skema bantuan berupa pinjaman.

Sayangnya lembaga donor internasional yang diwakili oleh IMF dengan program restrukturisasi dan World Bank dengan program desentralisasinya, ternyata tidak hanya menolong Indonesia keluar dari krisis, akan tetapi semakin menjerumuskan Indonesia ke dalam jerat hutang internasional.

Krisis ekonomi Asia di tahun 1997 membawa dampak jatuhnya penguasa militer di Indonesia. Situasi memaksa Indonesia untuk berpaling pada lembaga donor internasional untuk mendapatkan pinjaman, dan bantuan pun datang dalam bentuk program restrukturisasi berupa Structural Adjustment Programs (SAPs). Dalam pengawasan ketat dari lembaga donor, Indonesia kemudian meluncurkan program desentralisasi yang ekspansif.

Pasca reformasi memunculkan rancangan perundangan baru mengenai desentralisasi pemerintahan dengan maksud memperbaiki sistem pemerintah otoriter masa lalu. Tidaklah mengherankan, undang-undang mengenai desentralisasi kemudian dirancang tanpa melihat kondisi nyata di daerah yang beragam. Perpindahan kekuasaan seketika dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kemudian dirayakan dengan munculnya euphoria rakyat di daerah.

Terbutakan oleh kekuasaan yang baru diperoleh dan terlalu banyaknya beban tanggung jawab dalam waktu singkat, pemerintah daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjuang keras untuk mengikuti perubahan. Pegawai pemerintah daerah di beberapa tempat menemukan cara baru untuk memperkaya diri, keluarga, dan kroninya. Ketika rakyat di daerah kemudian menyadari bahwa kepentingan mereka tidak penting bagi pemerintahnya yang hanya tertarik untuk memperkaya diri, merekapun perlahan mulai memperjuangkan hak-hak mereka. Seringkali perjuangan rakyat daerah mencetuskan kekerasan etnik dan keagamaan ketika rakyat daerah terbagi-bagi berdasarkan etnik dan agama. Di lain tempat, masih terdapat pasukan gerilya yang telah berjuang sejak lama untuk melawan kesewenangan eksploitasi hasil alam oleh pemerintah pusat seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh.

Secara garis besar, pemerintah pusat menolak pelimpahan kewenangan pada pemerintah daerah demi mempertahankan kekuasaannya sedapat mungkin. Pemerintah pusat kemudian menarik kembali Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 22/1999 untuk direvisi menjadi Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 32/2004 yang menyebabkan pemerintah daerah kembali sebagai obyek, menjadikan mereka curiga terhadap upaya mengembalikan kekuasaan pada pemerintah pusat.

Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, salah satu isu yang kerap menghantam pemerintahan orde reformasi adalah gerakan separatisme yang berupa keinginan kelompok tersebut untuk merdeka, melepaskan diri dari NKRI. Terhitung, insiden 29 Juni 2007 mencatat penyusupan para penari Cakalele membentangkan bendera RMS berukuran raksasa, telah mencoreng kewibawaan simbol

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara yaitu sosok Presiden SBY yang berdiri tepat di depannya. Seolah mengekor insiden di Propinsi Maluku, Kongres Masyarakat Adat Papua secara gegap gempita menyerukan Papua merdeka. Gelombang reaksi pro dan kontra berdatangan dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan Congressman Amerika Serikat, Eni Faleomavaega, pada awalnya datang secara khusus memenuhi undangan datang ke Papua demi mendukung niatan merdeka tersebut, sebelum akhirnya diberhentikan langkahnya secara diplomatis oleh pemerintah Indonesia di istana negara saja. Terlepas dari kemampuan diplomatis wakil presiden membujuk sang Congressman untuk meyakinkan bahwa selama ini Pemerintah AS sudah salah menilai Indonesia pada kasus Papua, namun kenyataan di bumi Papua bukanlah isapan jempol. Nun jauh di timur Indonesia, ada sekelompok minoritas meneriakkan merdeka, menisbatkan diri mereka bukan bagian dari NKRI.

Sudah waktunya pemerintah, kalangan akademisi, bahkan kelompok-kelompok diskusi dalam masyarakat membuka diri terhadap perubahan, termasuk diantaranya memberikan peluang untuk ide bangunan negara[63] federal secara akademik untuk muncul kembali dalam perdebatan publik. Bila perlu perdebatan sehat semacam ini diakomodasi dalam

[63] Bangunan negara harus dibedakan dengan bentuk negara. Bentuk negara berkaitan dengan kepala negara ada dua macam: Republik dikepalai oleh presiden dan Monarki dikepalai oleh seorang raja atau ratu. Sedangkan bentuk pemerintahan merujuk pada sistem yang menandakan hubungan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif yaitu: sistem parlementer dan presidensiil. Sedangkan bangunan negara di dunia ada tiga jenis: Unitarian, Federasi, dan Konfederasi. Lihat I Made L. Wiratama, "*Purifikasi Sistem Presidensiil*," dalam *Disain Baru Sistem Politik Indonesia*, ed. Indra J. Piliang dan Tommy A. Legowo (CSIS: 2006), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan rancangan amandemen Konstitusi selanjutnya semisal di dalam joint session MPR.

Demi membangun otonomi daerah yang bertanggung jawab dan demi membangun tatanan bangunan negara baru tersebut, langkah selanjutnya adalah membuang jauh-jauh sentimen terhadap gerakan separatisme, karena pada hakekatnya isu separatisme telah hidup puluhan tahun setua umur republik ini. Separatisme muncul karena ada kepentingan minoritas yang terabaikan pemerintah pusat.

Mengingat konsep kekuasaan dari rakyat untuk rakyat yang sepertinya lebih banyak ditawarkan oleh sistem federal, maka tidak ada salahnya mencoba kembali pemberlakuan sistem federal. Namun demikian, bercermin pada pengalaman RIS di masa lalu, perlu kita sadari bersama bahwa pemberlakuan sistem federal harus didasari oleh pengkajian lebih dalam.

Untuk sementara waktu, pemerintah harus bersikap tegas dalam usahanya mengakomodasi kepentingan minoritas tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional. Jangan sampai pemerintah kemudian terjerumus dalam konflik etno-regional lebih dalam yang justru mengesampingkan kenyataan bahwa masih banyak rakyat kelaparan.[64]

---

[64] Prosentase penduduk miskin hanya turun kurang lebih 1 persen menjadi 16,58% atau 37,17 juta di bulan Maret 2007 dari 17,75% atau 39,30 juta di bulan Maret 2006. Bisnis Indonesia, BPS dituding rekayasa data kemiskinan: Jumlah penduduk miskin turun, Bisnis.com online (3 Juni 2007) http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/ekonomi-makro/1id12665.html (diakses 28 Juli 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal inilah yang justru dapat mendatangkan malapetaka lebih besar yaitu runtuhnya bangunan NKRI oleh karena banyaknya rakyat lapar dan marah daripada berdebat 'kusir' tentang keniscayaan negara federasi.

Oleh karena itu, peraturan mengenai desentralisasi kekuasaan politik, ekonomi, dan pemerintahan menyalakan konflik pemerintah pusat dan daerah sehingga mengantarkan Indonesia ke arah ketidakstabilan politik akibat ketidakjelasan pembagian kekayaan dan kekuasaan antara tiap tingkatan pemerintah dan munculnya revisi perundangan mengenai desentralisasi.

2. Penerapan dan Pelaksanaan Gerakan HMI Cabang Surabaya yang Berkaitan dengan Perubahan Sosial Pasca Reformasi

Berada dalam posisi pasca reformasi didahului proses pengisian masa peralihan dari Pra-reform, gerakan HMI Cabang Surabaya lebih bersifat penentangan terhadap pengkebirian hak-hak umat Islam dalam memenuhi kebutuhan beribadah dan sekaligus penentangan terhadap kebijakan pemerintah yang inkonstitusional, beberapa gerakan yang muncul seperti :[65]

a. Gerakan anti asas Tunggal oleh aktivis Muslim
b. Oposisi umat Islam terhadap Orde Baru.
c. Penolakan pemerintah terhadap jilbab
d. Timbulnya idiom SARA

[65] Wawancara dengan Badruz Zaman (mantan ketum HMI Cabang Surabaya), Senin 22 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terlaksananya reformasi maka penyampaian risalah (ideologi) mulai dapat dilaksanakan sebab dari sisi policy pemerintah telah memperoleh *pressure effect*, namun proses peralihan ini mengalami perlambatan, terkait instabilitas object (pemerintah) maupun instabilitas subject (pelaku pergerakan). Bahkan perjalanan reformasi mendekati jalan ditempat.

Mekanisme transisi politik dari pemerintahan ortoriter ke demokratis menurut afdillah (mantan Ketua Umum HMI Cabang Surabaya periode 2005-2006) ada empat model yang berkembang:[66]

a. Model transformasi

Dalam hal ini, inisiatif demokratisasi berasal dari pemerintah. Pemerintahlah yang melakukan liberalisasi sistem politik.

b. Model replasi

Model ini terjadi ketika pemerintah yang berkuasa dipaksa untuk meletakkan kekuasaannya dan kemudian digantikan oleh kekuatan oposisi (sipili).

c. Model transplasi

Model ini merupakan gabungan dari dua model yang sudah disebutkan di atas. Model ini terjadi karena pemerintah yang berkuasa masih kuat, sementara pihak oposisi belum terlalu solid untuk menjatuhkannya. Maka diupayakanlah berbagai proses negosiasi antara pihak pemerintah dan pihak oposisi tentang bagaimana langkah-

[66] Wawancara dengan Afdillah yang mengutip dari pemikiran Huntington, Selasa 23 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langkah yang harus diambil bersama untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis secara gradual.

d. Model intervensi

Model ini terjadi disebabkan oleh keterlibatan pihak eksternal yang turut campur. Contoh kasus yang paling tepat barangkali adalah intervensi angkatan perang AS terhadap pemerintahan Panama dengan tuduhan keterlibatan jaringan perdagangan obat bius. Intervensi akhirnya mendorong dilaksanakan pemilu yang demokratis.

Reformasi Indonesia tidak mewakili secara tepat pola-pola diatas, gerakan HMI Cabang Surabaya menyerupai model replasi sedangkan transisi pasca 1998 berjalan menyerupai model transplasi.

Sedangkan fenomena gerakan HMI Cabang Surabaya secara general belum menunjukkan arah yang mencerahkan. Ada beberapa kondisi yang dialami HMI Cabang Surabaya pada waktu itu :[67]

a. Euphoria Reformasi

Reformasi telah merubah segalanya, merupakan paradigma yang terbentuk dalam setiap kader HMI, sedangkan mandat reformasi dititipkan pada pihak-pihak yang terindikasi pada neo-orba. Sehingga bergelimpanganlah *idle potention* yang menjadi kuburan pergerakan mahasiswa muslim.

[67] Loc., it.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Benturan Horizontal

Munculnya haroqah Islam satu sisi memperlihatkan dinamika apik yang berkembang dalam ranah pergerakan, namun sangat disayangkan haroqah islamiyah yang muncul di Indonesia menjadi *counter block* antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang kita khawatirkan, tumbuhnya haroqah Islamiyah memunculkan potensi konflik antara satu dengan yang lainnya.

c. Ekslusivisme

Jargon mahasiswa untuk rakyat menjadi hampa, dan amanah HMI menjadikan islam sebagai rahmatan lilalamin telah melemah. Delapan puluh tujuh tahun yang lalu hal ini telah dikhawatirkan oleh beberapa alumni-alumni HMI pada tingkatan nasional, :

d. Pergerakan tanpa ruh

Pergerakan HMI terancam kebekuan ketika risalah yang dibawa tidak melekat dan tidak tercermin dari kepribadian, Islam hanya topeng bagaikan pemanis buatan untuk melengkapi orasi kosong, maka lambat laun pilar peradaban akan roboh dengan sendirinya.

e. Dis-Orientasi Gerakan

Munculnya ketidakpercayaan diri dari Gerakan Mahasiswa Islam secara umum dalam mengangkat isu-isu ke-Islaman baik bersifat lokal ataupun dalam skala yang lebih luas (regional-global). Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi jebakan bagi HMI sendiri yang memudarkan identitas hakiki yang mesti mendominasi pergerakan.

f. Gerakan Reaksioner

Gebrakan yang dilakukan mahasiswa muslim cenderung tiba-tiba dan sesaat, sehingga tahapan-tahapan yang terkait dengan misi pendukung tidak terlihat jelas. Muncul sebentar kemudian lenyap

C. Pembahasan

1. Strategi Gerakan HMI Cabang Surabaya (dari Struktural Politis ke Kultural Intelektual)

Sidratahta Mukhtar dalam bukunya HMI dan kekuasaan, telah mencoba menguraikan strategi pengkaderan HMI yang sollwerte-Nya adalah sukses menjadi kader-kader yang akan mengisi struktur kekuasan di negari ini. Secara praktis pendapat Sidratahta Mukhtar menemui logikanya pada fakta yang ada banyak politisi dan eksekutif maupun legislatif mengawali perjalanannya dari HMI.[68]

Dalam tradisi HMI Cabang Surabaya ada tiga kata kunci yang membuat Institusi ini berbeda dengan yang lainnya dalam mengoperasionalkan Latihan Kader (LK I)[69], tradisi intelektual dan indepedensi. Secara normatif ketiga unsur ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Namun dalam prakteknya ketiga unsur ini sering terpisah, independensi sering tercemar

[68] Sidratahta Muhtar, *HMI dan Kekuasaan*, (Jakarta, Adityamedia, 2007), h.56

[69] LK I merupakan latihan bagi kader HMI yang beru masuk dalam organisasi ini, yang di dalamnya berisi materi dan pelatihan tentang HMI tahap awal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan hal-hal yang pragmatis perebutan kekuasaan di kampus-kampus menjadi ajang pengkaderan politik bagi HMI Cabang Surabaya, tradisi intelektual sering ditelantarkan pada hal-hal yang bersipat ritualitas. Sebuah gugatan sering terlontar dari mulut-mulut kader HMI Cabang Surabaya yang merasa pencariannya dalam HMI tidak kunjung bermuara.

Siklus kehidupan HMI hari ini mulai bermuara pada satu tujuan yaitu posisi struktural. Kenyataan ini tidak semestinya dihapuskan posisi struktural adalah sawah dimana bibit perjuangan mulai disemaikan, namun jabatan struktural bukan dijadikan goal values dari semua siklus alumni HMI, tetapi idealnya goal akan posisi struktural dalam negera dijadikan komplementer yang menyempurnakan proses transformasi yang dilakoni oleh alumni HMI dalam skala yang lebih formil guna menata kehidupan yang lebih manusiawi.[70]

Akan tetapi jika ditelusuri ke lapangan, posisi struktural ternyata juga telah gagal dikuasai oleh HMI Surabay soalnya, pada universitas-universitas yang ada di Surabaya akar massaHMI mulai kabur dan direbut satu persatu oleh organisasi Islam mahasiswa yang lebih radikal, seperti halnya pada kampus-kampus besar (UNAIR, ITS dan IAIN Sunan Ampel Surabaya). Kenyataan ini menjadi pendorong bagi Institusi HMI untuk merenungkan diri, sembari meramu langkah strategis membenahi hal yang pantas untuk di benahi dan melakukan inovasi dalam meretas jalan baru

[70] Wawancara dengan Kholis (ketua Umum HMI Cabang Surabaya periode 2009-2010, pada Kamis, 25 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mungkin membuat HMI kembali berbeda dan tidak terjebak dengan mitos yang lahir dari pikiran-pikiran yang liar.[71]

Berangkat dari kondisi kehidupan umat yang mulai dipenjara oleh pemahaman keagamaan yang kian pragmatis, hal ini didorong oleh mengalirnya pemikiran dari kelompok-kelompok yang terbelah oleh proliferasi ideologi yang cenderung berkiblat kepada barat dan timur, sehingga ruh dari Islam itu sendiri tidak benar-benar aktual dalam pergulatan ideologi ini. Maka HMI Cabang Surabaya dalam kondisi ini harus mampu mencerahkan umat dari pemikiran yang berkarakter ideologi Barat dan Timur.

Sebagai institusi yang telah mendapatkan amanah dalam tataran historis di wilayah Surabaya, HMI Cabang Surabaya hari ini telah kehilangan tokoh-tokoh Inspirator setelah Cak Nur, HMI terjebak dalam ruang hampa ideologi barat dan timur. Oleh karena itu sebagai keniscayaan dari dinamika sejarah, HMI Cabang Surabaya idealnya harus berani memerankan diri persis yang diperankan oleh Cak Nur dalam bentuk gerakan transformatif, hal ini guna membangun masyarakat Surabaya yang tercerahkan dalam aspek sosio-religi, sosio-ekonomi, sosio-politik dan sosio-budaya.

Kalau ditelisik model pengkaderan yang dilakukan oleh HMI Cabang Surabaya, maka dapat dinilai bahwa orientasi HMI Cabang Surabaya selama ini terkesan sebagai pengkaderan yang diproses melalui

---

[71] Loc. Cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LK dengan muatan materi yang terkosentrasi untuk melahirkan kader yang sukses dalam lingkaran struktural politik. Kondisi ini mendorong proses pembenahan orientasi pengkaderan ke arah lingkaran kultural-intelektual menjadi keharusan untuk memproduksi kader-kader HMI Cabang Surabaya yang mampu melakukan transformasi pemikirannya ke tengah-tengah masyarakat. Maka output dari pengkaderan HMI Cabang Surabaya ke depan adalah kaum cendikiawan, namun dari proses ini tidak tertutup kemungkinan lahirnya seorang negarawan yang berbasiskan cendikia.

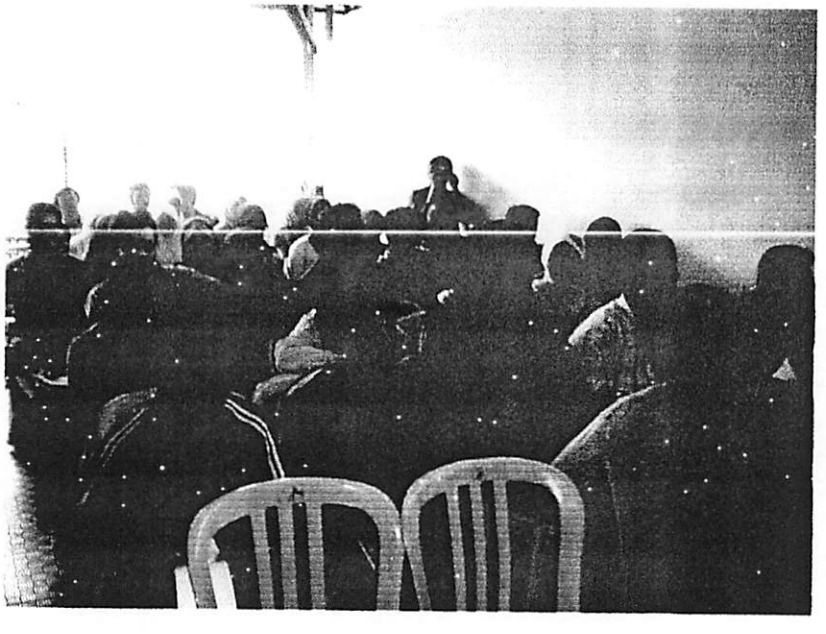

Gambar 3: Suasana LK I yang diadakan HMI Cabang Surabaya

Selama ini dalam kenyataannya kurikulum pengkaderan HMI terutama LK I lebih bersipat *basic leader*, hasrat akan lahirnya penguasa ketimbang cendikiawan telah menjadi tradisi dalam ritualitas LK I HMI, sehingga tidaklah mengherankan jika kader-kader HMI hari ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sensitiv dengan wacana-wacana pemikiran agama yang tentunya telah menjadi *basic need* dalam masyarakat untuk menilai HMI.

LK I selayaknya diarahkan sebagai forum pelatihan yang mempersiapkan alat-alat analisis bagi kader untuk melakukan korektisasi dan interpretasi terhadap makna-makna yang diajarkan Islam termasuk mempersiapkan alat analisis untuk melakukan counter terhadap trik-trik globalisasi pembenahan kurikulum yang mempersiapkan alat analisis bagi kader merupakan strategi baru untuk mewujudkan HMI yang berbeda yaitu HMI transformatif.[72]

2. Status dan Aspek-Aspek Gerakan Sosial HMI Cabang Surabaya Pasca Reformasi

Gerakan mahasiswa 1998 yang punya andil dalam menumbangkan rezim Soeharto adalah suatu gerakan sosial. Maka sebelum membahas status dan aspek-aspek dalam gerakan HMI Cabang Suraabaya pasca reformasi, akan coba diulas di sini beberapa konsep tentang status dan peran gerakan sosial.

Masyarakat Surabaya dapat dipandang terdiri dari seperangkat posisi-posisi sosial. Posisi sosial ini dinamakan status. Farley mengungkapkan, ada berbagai macam status berdasarkan cara memperolehnya. Pertama, status yang diperoleh begitu saja tanpa suatu usaha tertentu dari orang bersangkutan (*ascribed status*). Misalnya, status

[72] Loc. Cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diterima begitu saja ketika orang terlahir sebagai laki-laki atau perempuan (jenis kelamin), berkulit putih atau berkulit hitam (ras), dan karakteristik keluarga tempat orang itu dilahirkan. Kedua, status yang diperoleh setidaknya sebagian melalui upaya tertentu atau perjuangan dari orang bersangkutan (*achieved status*). Seperti: jabatan di kantor, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan.[73] Status mahasiswa tentu termasuk kategori kedua ini.

Ada berbagai faktor yang menentukan suatu kedudukan sosial dalam masyarakat Surabaya. Antara lain: kelahiran, unsur biologis, harta kekayaan, pekerjaan, agama. Kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat tidak ditentukan oleh satu faktor saja. Bisa terjadi, beberapa faktor sekaligus menentukan kedudukan sosial seseorang atau suatu golongan, sehingga sulit menentukan faktor mana yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kedudukan sosial.[74]

Jelas bahwa ada beberapa status dalam masyarakat Surabaya yang lebih bersifat sentral dan penting dalam kehidupan seseorang dibandingkan status-status lain. Bagi kebanyakan orang, ada satu status yang ditempatkan di atas status-status lain, dilihat dari segi pengaruhnya terhadap kehidupan orang tersebut. Status semacam itu dinamakan master status. Misalnya, untuk orang dewasa, kemungkinan master status-nya adalah pekerjaan (*occupation*), atau bisa jadi posisinya dalam keluarga

[73] Lihat Farley, John E., 1992. Sociology. New Jersey: Prentice Hall, h. 88-89
[74] Hendropuspito, D., OC. 1989. Sosiologi Sistematik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, h. 105-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai ayah, suami, atau istri.[75]

Karena pada saat yang sama seseorang memegang berbagai status yang berbeda, dan status-status ini boleh jadi tidak memiliki peringkat yang sama, dapat terjadi ketidakkonsistenan status. Kondisi ini disebut juga ketidaksesuaian status (*status discrepancy*) atau keganjilan status (*status incongruity*). Inkonsistensi status tampak, misalnya, bilamana seseorang secara umum tidak diakui menyandang suatu status padahal status itu dirasakannya pantas, seperti orang kaya baru yang dicemoohkan oleh orang yang berdarah ningrat. Contoh lain, seorang pria menjadi sekretaris dari eksekutif wanita, atau orang berpendidikan tinggi yang terpaksa harus menerima pekerjaan berkualifikasi rendah.[76]

Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih peran sosial. Menurut Horton dan Hunt [1993], peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Sedangkan status/kedudukan itu sendiri adalah suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya.[77]Setiap orang mungkin memiliki sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status itu. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.

---

[75] Ibid., h. 89

[76] Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt, *Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari).* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993), h.129-130.

77 Ibid., h.118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Abu Ahmadi [1982] mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.[78]

Posisi sosial yang ditempati seseorang dinamakan status, sedangkan perilaku yang diharapkan dari orang yang menempati posisi itu disebut peran. Peran sosial mirip dengan peran yang dimainkan seorang aktor. Bilton, et al. [1981] menyatakan, orang yang memiliki posisi-posisi atau status-status tertentu dalam masyarakat diharapkan untuk berperilaku dalam cara-cara tertentu yang bisa diprediksikan, seolah-olah sejumlah "naskah" (scripts) sudah disiapkan untuk mereka.[79]

Namun harapan-harapan yang terkait dengan peran-peran ini tidak hanya bersifat satu-arah. Seseorang tidak hanya diharapkan memainkan suatu peran dengan cara-cara khas tertentu, namun orang itu sendiri juga mengharapkan orang lain untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap dirinya. Seorang dokter dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sangat pribadi kepada pasien dan mengharapkan pasiennya menjawab dengan jujur. Sebaliknya si pasien mengharapkan dokter untuk merahasiakan dan tidak menyebarkan informasi yang bersifat pribadi ini ke pihak lain. Jadi peran sosial itu melibatkan situasi saling mengharapkan (mutual expectations).[80]

---

78 Ahmadi, Abu, *Psikologi Sosial*. (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1982), h. 50.
79 Bilton, Tony, Kevin Bonnet, Philip Jones, Michelle Stanworth, Ken Sheard, dan Andrew Webster, *Pengenalan Sosiologi*, (Hong Kong: The Macmillan Press, 1981), h.18
80 Ibid., h. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peran sosial karena itu bukanlah semata-mata cara orang berperilaku yang bisa diawasi, tetapi juga menyangkut cara berperilaku yang dipikirkan seharusnya dilakukan orang bersangkutan. Gagasan-gagasan tentang apa yang seharusnya dilakukan orang, tentang perilaku apa yang "pantas" atau "layak", ini dinamakan norma.

Analisa		**Objek**
Masalah Sosial	Identifikasi Masalah	Komunitas
	Upaya Pemecahan	
Aksi Sosial	Proses pendampingan	LSM
	Proses belajar sosial	Stake Holder
	Proses partisipasi	Masyarakat
	Proses Akuntabilitas publik	Kepanitiaan
Perubahan Sosial	Perubahan Norma sosial	masyarakat
	Perubahan institusi sosial	Pemerintahan
	Perubahan kelompok sosial	masyarakat
	Perubahan stratifikasi sosial	masyarakat

Tabel 2 : Metode program gerakan HMI Cabang Surabaya[81]

Harapan-harapan terpenting yang melingkupi peran sosial bukanlah sekedar pernyataan-pernyataan tentang apa yang sebenarnya terjadi tentang apa yang akan dilakukan seseorang, di luar kebiasaan, dan seterusnya tapi norma-norma yang menggarisbawahi segala sesuatu, di

[81] Dokumentasi program gerakan HMI Cabang Surabaya Periode 2006-2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana seseorang yang memiliki status diwajibkan untuk menjalankannya. Jadi, peran-peran itu secara normatif dirumuskan, sedangkan harapan-harapan itu adalah tentang pola perilaku ideal, terhadap mana perilaku yang sebenarnya hanya bisa mendekati.

Setiap orang memainkan sejumlah peran yang berbeda, dan kadang-kadang peran-peran tersebut membawa harapan-harapan yang bertentangan. Menurut Hendro Puspito [1989], konflik peran (role conflict) sering terjadi pada orang yang memegang sejumlah peran yang berbeda macamnya, kalau peran-peran itu mempunyai pola kelakuan yang saling berlawanan meski subyek atau sasaran yang dituju sama. Dengan kata lain, bentrokan peranan terjadi kalau untuk menaati suatu pola, seseorang harus melanggar pola lain.[82]

Setidaknya ada dua macam konflik peran. Yakni, konflik antara berbagai peran yang berbeda, dan konflik dalam satu peran tunggal. Pertama, satu atau lebih peran (apakah itu peran independen atau bagian-bagian dari seperangkat peran) mungkin menimbulkan kewajiban-kewajiban yang bertentangan bagi seseorang. Kedua, dalam peran tunggal mungkin ada konflik inheren.[83] Adanya harapan-harapan yang bertentangan dalam satu peran yang sama ini dinamakan role strain.[84]

Satu hal yang menyebabkan terjadinya role strain adalah karena peran apapun sering menuntut adanya interaksi dengan berbagai status lain yang berbeda. Sampai tingkatan tertentu, masing-masing interaksi ini

82 Op cit., Hendropuspito, h. 193.
83 Op.cit,Horton, h. 136.
84 Op.cit, Farley, h. 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merumuskan peran yang berbeda, karena membawa harapan-harapan yang berbeda pula. Maka, apa yang tampak sebagai satu peran tunggal mungkin dalam sejumlah aspek sebenarnya adalah beberapa peran.

Misalnya, status sebagai karyawan bagian pemasaran (sales) eceran di sebuah perusahaan, dalam arti tertentu sebenarnya membawa beberapa peran: sebagai bawahan (terhadap atasan di perusahaan itu), sebagai sesama pekerja (terhadap karyawan-karyawan lain di perusahaan itu), dan sebagai penjual (terhadap konsumen dan masyarakat yang ditawari produk perusahaan tersebut).

Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton [1968] dinamakan perangkat peran (role set).[85]Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (nature) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula.

Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena

---

85 Merton, Robert. 1968. *Teori Sosial dan Budaya, 2nd ed.. New York: Free Press, h. 41-45, sebagaimana dikutip dalam John E. Farley. 1992. Sociology.* (New Jersey: Prentice Hall), h. 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa alasan.

Menurut Horton dan Hunt [1993], seseorang mungkin tidak memandang suatu peran dengan cara yang sama sebagaimana orang lain memandangnya. Sifat kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana orang itu merasakan peran tersebut. Tidak semua orang yang mengisi suatu peran merasa sama terikatnya kepada peran tersebut, karena hal ini dapat bertentangan dengan peran lainnya. Semua faktor ini terpadu sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua individu yang memerankan satu peran tertentu dengan cara yang benar-benar sama.[86]

Ada beberapa proses yang umum untuk memperkecil ketegangan peran dan melindungi diri dari rasa bersalah. Pertama, rasionalisasi, yakni suatu proses defensif untuk mendefinisikan kembali suatu situasi yang menyakitkan dengan istilah-istilah yang secara sosial dan pribadi dapat diterima. Rasionalisasi menutupi kenyataan konflik peran, yang mencegah kesadaran bahwa ada konflik. Misalnya, orang yang percaya bahwa "semua manusia sederajat" tapi tetap merasa tidak berdosa memiliki budak, dengan dalih bahwa budak bukanlah "manusia" tetapi "benda milik."

Kedua, pengkotakan (*compartmentalization*), yakni memperkecil ketegangan peran dengan memagari peran seseorang dalam kotak-kotak kehidupan yang terpisah, sehingga seseorang hanya menanggapi seperangkat tuntutan peran pada satu waktu tertentu. Misalnya, seorang

86 Op.cit, Horton, h. 120-121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politisi yang di acara seminar bicara berapi-api tentang pembelaan kepentingan rakyat, tapi di kantornya sendiri ia terus melakukan korupsi dan merugikan kepentingan rakyat.

Ketiga, ajudikasi (adjudication), yakni prosedur yang resmi untuk mengalihkan penyelesaian konflik peran yang sulit kepada pihak ketiga, sehingga seseorang merasa bebas dari tanggung jawab dan dosa.

Terakhir, kadang-kadang orang membuat pemisahan secara sadar antara peranan dan "kedirian" (*self*), sehingga konflik antara peran dan kedirian dapat muncul sebagai satu bentuk dari konflik peran.[87] Bila orang menampilkan peran yang tidak disukai, mereka kadang-kadang mengatakan bahwa mereka hanya menjalankan apa yang harus mereka perbuat. Sehingga secara tak langsung mereka mengatakan, karakter mereka yang sesungguhnya tidak dapat disamakan dengan tindakan-tindakan mereka itu.[88]

Konflik-konflik nyata antara peran dan kedirian itu dapat dianalisis dengan konsep jarak peran (role distance) yang dikembangkan Erving Goffman. "Jarak peran" diartikan sebagai suatu kesan yang ditonjolkan oleh individu bahwa ia tidak terlibat sepenuhnya atau tidak menerima definisi situasi yang tercermin dalam penampilan perannya. Ia melakukan komunikasi-komunikasi yang tidak sesuai dengan sifat dari peranannya

---

87 Berry, David. 1983. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. (Disunting dan diantar oleh Paulus Wirutomo). Jakarta: CV. Rajawali, h. 131

88 Contohnya, adalah tentara yang dengan alasan harus mematuhi perintah atasan dan menegakkan ketertiban menembaki mahasiswa yang berunjuk rasa. Ia mengatakan, sebetulnya hati kecilnya tidak tega menembaki mahasiswa, namun ia tak punya pilihan kecuali melaksanakan perintah dan menegakkan ketertiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menunjukkan bahwa ia lebih dari sekedar peran yang dimainkannya. Seperti, pelayan toko yang mengusulkan pembeli untuk pergi ke toko lain karena mungkin bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Ini merupakan tindakan mengambil jarak dari peran yang mereka lakukan dalam suatu situasi.

Penampilan "jarak peran" menunjukkan adanya perasaan kurang terikat terhadap peranan. Pada sisi lain, "penyatuan diri" dengan peranan secara total merupakan kebalikan dari "jarak peran." Penyatuan diri terhadap peran tidak dilihat dari sikap seseorang terhadap perannya, tetapi dari tindakan nyata yang dilakukannya. Seorang individu menyatu dengan perannya bila dia menunjukkan semua kemampuan yang diperlukan dan secara penuh melibatkan diri dalam penampilan peran tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id